BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPK merupakan lembaga negara yang memiliki *independensi* dan otonomi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, serta institusi atau badan lain yang memanfaatkan dana negara (Hamdani & Misra, 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berlandaskan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN menetapkan prinsip-prinsip yang mencakup *independensi*, integritas, dan *profesionalisme* pemeriksa yang harus dijunjung tinggi oleh *auditor* (SPKN, 2017). Auditor BPK RI di Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, diharapkan mampu meningkatkan kualitas *audit* sebagai *respons* atas tuntutan masyarakat untuk menangani kasus korupsi yang semakin marak serta memastikan tindak lanjut yang efektif.

Fenomena korupsi dalam kasus tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2024 mengungkapkan pentingnya *independensi*, integritas, dan *profesionalisme* dalam profesi *auditor* untuk menjamin kualitas audit yang tinggi. Kasus ini melibatkan Lernhard Febrian Sirait, staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memberikan uang sebesar Rp 1,135 miliar kepada Robertus

Kresnawan, *auditor* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mengamankan hasil pemeriksaan BPK. Pemberian uang yang terjadi sebanyak 16 kali dari Januari hingga Desember 2022 ini menunjukkan adanya celah dalam *independensi auditor* yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan korupsi. Uang tersebut diserahkan dalam berbagai bentuk, mulai dari tunai yang disimpan dalam kotak sepatu hingga transfer rekening, dengan tujuan untuk memanipulasi hasil audit (DetikNews, 2024).

Robertus seharusnya melaksanakan tugasnya dengan sikap *independen* dan *objektif* dalam mengevaluasi laporan keuangan Kementerian ESDM. Namun, keterlibatannya dalam menerima suap menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip integritas dan *profesionalisme*, yang seharusnya menjadi landasan utama setiap *auditor*. Integritas seorang *auditor* adalah elemen mendasar yang memastikan bahwa semua penilaian dan hasil *audit* dilakukan secara jujur dan berdasarkan fakta. Di sisi lain, *profesionalisme* menuntut *auditor* untuk tetap objektif serta tidak terpengaruh oleh tekanan *eksternal* atau insentif finansial yang dapat memengaruhi penilaian mereka (Tempo.com, 2024).

Kasus ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga *audit* dan sistem keuangan negara. Para terdakwa, termasuk sejumlah pejabat dan staf di Kementerian ESDM, terbukti memanipulasi dana anggaran tunjangan kinerja (tukin) dengan cara menggelembungkan jumlah tunjangan yang seharusnya diterima. Praktik manipulasi ini berlangsung selama periode 2020 hingga 2022, yang berujung pada kerugian negara yang signifikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan secara kolektif dan berkesinambungan, sekaligus

bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi yang sedang digencarkan oleh pemerintah, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat negara sangat membutuhkan dana untuk menangani krisis kesehatan (Tempo.com, 2024).

Dalam situasi ini, etika *auditor* menjadi faktor kunci yang berperan sebagai *variabel* moderator, yang mampu memperkuat atau melemahkan pengaruh *independensi*, integritas, dan *profesionalisme* terhadap kualitas *audit*. Penelitian ini bertujuan untuk meng-*eksplorasi* sejauh mana etika *auditor* dapat memoderasi hubungan tersebut, sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas *audit* di masa mendatang. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih spesifik mengenai pentingnya etika dalam praktik *audit* serta penguatan regulasi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan (Kompas, 2024).

Kualitas *audit* yang unggul memegang peranan penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi. *Auditor*, sebagai pihak yang berwenang dan berkompeten dalam memeriksa laporan keuangan, operasional, dan sistem pengendalian internal, memainkan peran kunci dalam proses ini. Aswar, *et. al.*, (2021), menyebutkan bahwa tugas utama *auditor* adalah memastikan laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta menyajikan informasi yang akurat dan lengkap.

Menurut Rohmanullah, (2020), *auditor* harus menjaga kualitas *audit* agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dipercaya oleh para pengguna. Kualitas audit dapat diukur melalui kemampuan *auditor* untuk mendeteksi dan melaporkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan

klien. Pendekatan yang digunakan melibatkan fokus pada hasil *audit* dan proses *audit* itu sendiri (Afzal, 2023).

Kualitas *audit* mencerminkan kemampuan *auditor* dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran terhadap prinsip akuntansi dalam laporan keuangan. Tinggi rendahnya kualitas *audit* sering kali dipengaruhi oleh dilema yang dihadapi *auditor*, terutama ketika kepentingan instansi pemerintah yang di-*audit* bertentangan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan (Kamil *et. al*., 2023). Oleh karena itu, Kamil *et. al*., (2023) menekankan bahwa *auditor* tidak hanya harus mempertimbangkan kepentingan pemerintah, tetapi juga wajib memperhatikan kualitas *audit* yang dihasilkan. Hal ini penting karena kualitas *audit* yang baik dapat membangun kredibilitas laporan keuangan, memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat (Kamil *et. al*., 2023).

Bedros (2022) menekankan bahwa *auditor* harus tetap *independen*, objektif, dan mematuhi standar *audit* yang berlaku. Ketika *auditor* berhasil mendeteksi ketidaksesuaian dan mempertahankan kualitas *audit* yang tinggi, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan pelaporan keuangan pemerintah secara keseluruhan. Kualitas *audit* yang baik juga bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya, karena memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat (Bedros, 2022).

Menjaga kualitas *audit* sangat penting untuk mencegah pengguna laporan keuangan membuat keputusan yang salah. Kualitas *audit* mencakup kredibilitas dan keandalan informasi yang disajikan, dengan kriteria seperti ketepatan waktu, kelengkapan, akurasi, objektivitas,

kejelasan, dan ringkasnya informasi (Handoko *et. al*., 2019). Faktor *independensi profesional* sangat memengaruhi kualitas *audit*. *Independensi* mengharuskan *auditor* untuk tidak memihak atau dipengaruhi oleh pihak manapun, serta tetap bebas dari benturan kepentingan (SPKN, 2017).

Mahdi *et. al.,* (2023) menambahkan bahwa integritas, yang meliputi kejujuran, kebijaksanaan, keberanian, dan tanggung jawab, adalah elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil kerja *auditor*. Kurangnya integritas dapat menurunkan kualitas *audit*. Ismail *et. al.,* (2019), menegaskan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, *auditor* tidak hanya perlu bersikap *independen* dan memiliki integritas, tetapi juga menunjukkan *profesionalisme*. *Profesionalisme* memungkinkan *auditor* melaksanakan tugas dengan optimal sesuai standar etika yang tinggi.

Etika merupakan pedoman sikap dan perilaku yang harus dipatuhi *auditor* sesuai dengan norma yang berlaku dalam organisasi (SPKN, 2017). Hubais *et. al.,* (2023) menggarisbawahi pentingnya etika sebagai prinsip dasar yang mengatur perilaku *profesional auditor*. Dalam konteks teori keagenan, kualitas *audit* berhubungan erat dengan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mengandalkan *auditor* untuk melakukan *audit independen* terhadap laporan keuangan pemerintah sebagai pihak ketiga (Alqudah *et. al*., 2023).

Kualitas *audit* diukur melalui kemampuan *auditor* untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran, yang menjadi kunci dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (Handoyo, 2022). Teori keagenan juga menegaskan bahwa publik atau

pemerintah bertindak sebagai prinsipal, sedangkan pegawai pemerintah yang mengelola dana berperan sebagai agen. *Auditor* bertugas memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai peraturan, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik (Salim *et. al*., 2016).

Berdasarkan temuan-temuan di atas, peneliti menjadi termotivasi untuk mengeksplorasi penelitian yang berjudul "Pengaruh *Independensi*, Integritas dan *Profesionalisme* Terhadap Kualitas *Audit* dengan Etika *Auditor* Sebagai *Variabel* Moderasi Pada BPK RI Sumatera Barat". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas *audit* dan bagaimana etika *auditor* dapat memoderasi hubungan antara *variabel-variabel* tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, *auditor*, dan institusi lainnya dalam meningkatkan kualitas *audit* di Indonesia dan wilayah lainnya, khususnya dalam konteks Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Sumatera Barat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan klarifikasi, peneliti dapat mendefinisikan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Independensi* berpengaruh terhadap Kualitas *Audit*?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Kualitas *Audit*?
3. Apakah *Profesionalisme* berpengaruh terhadap Kualitas *Audit*?
4. Apakah *Etika Auditor* dapat memperkuat pengaruh *Independensi* terhadap Kualitas *Audit*?

5. Apakah *Etika Auditor* dapat memperkuat pengaruh Integritas terhadap Kualitas *Audit*?
6. Apakah *Etika Auditor* dapat memperkuat pengaruh *Profesionalisme* terhadap Kualitas *Audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris:

1. Untuk menguji dan membuktikan *Independensi* mempengaruhi Kualitas *Audit*
2. Untuk menguji dan membuktikan Integritas mempengaruhi Kualitas *Audit*
3. Untuk menguji dan membuktikan *Profesionalisme* mempengaruhi Kualitas *Audit*
4. Untuk menguji dan membuktikan Etika *Auditor* dapat meningkatkan pengaruh *Independensi* terhadap Kualitas *Audit*
5. Untuk menguji dan membuktikan Etika *Auditor* dapat meningkatkan pengaruh Integritas terhadap Kualitas *Audit*
6. Untuk menguji dan membuktikan Etika *Auditor* dapat meningkatkan pengaruh *Profesionalisme* terhadap Kualitas *Audit*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**:

a. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya *literatur* terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas *audit*, khususnya *independensi*, integritas, dan *profesionalisme auditor*, dengan mempertimbangkan etika *auditor* sebagai *variabel* moderasi. Temuan ini memperluas pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks *audit* sektor publik, khususnya di BPK RI yang memiliki peran penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. Penelitian ini mendukung Teori Kontinjensi, yang menyatakan bahwa efektivitas tindakan bergantung pada situasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *independensi*, integritas, dan *profesionalisme auditor* terhadap kualitas *audit* dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti budaya organisasi, tekanan politik, dan kompleksitas lingkungan kerja. Dalam konteks Dalam konteks ini, etika *auditor* bertindak sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut, tergantung pada kondisi yang dihadapi *auditor* saat melaksanakan tugasnya.

c. Temuan ini relevan dengan Teori Agen, yang menggambarkan hubungan antara *auditor* (agen) dan entitas yang di-*audit* (prinsipal). *Auditor* yang berintegritas dan *profesional*, terutama jika didukung oleh standar etika yang kuat, lebih mampu meminimalkan asimetri informasi dan mengurangi risiko konflik kepentingan. Dengan demikian, kualitas *audit* yang tinggi menjadi alat kontrol yang

efektif untuk melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

d. Penelitian ini juga memperkaya Teori Atribusi, yang menyatakan bahwa individu cenderung mengaitkan penyebab perilaku mereka pada faktor internal atau eksternal. *Auditor* yang memiliki *profesionalisme* tinggi dan menjunjung etika cenderung mengaitkan keberhasilan *audit* pada faktor internal, seperti tanggung jawab pribadi dan komitmen terhadap standar profesi. Sebaliknya, ketiadaan etika dapat menyebabkan *auditor* menyalahkan faktor *eksternal* atas kegagalan, yang berpotensi menurunkan kualitas *audit*.

e. Penelitian ini juga relevan dengan Teori Disonansi Kognitif, yang menjelaskan bahwa individu akan merasa tidak nyaman jika ada ketidaksesuaian antara keyakinan dan tindakan mereka. *Auditor* yang mengalami konflik antara tekanan eksternal dan prinsip etika akan merasakan disonansi kognitif. Etika *auditor* yang kuat dapat mengurangi ketegangan ini dengan membantu auditor tetap teguh pada standar *profesionalisme* dan integritas, meskipun menghadapi tekanan yang dapat mengancam *independensi* mereka.

f. Penelitian ini mendukung Teori Egoisme, yang menyatakan bahwa individu cenderung bertindak demi kepentingan pribadi. Dalam konteks *audit*, *auditor* yang memiliki kesadaran reputasi dan ingin menjaga kredibilitas *profesional*nya akan cenderung menjalankan audit dengan standar yang tinggi. Etika berperan sebagai pengendali egoisme, mengarahkan *auditor* untuk tetap berperilaku *profesional*

demi keuntungan jangka panjang, baik untuk diri sendiri maupun institusi tempat mereka bekerja.

g. Temuan ini juga memperkaya Teori *Utilitarianisme*, yang berfokus pada tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. *Auditor* yang beretika tinggi tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari hasil audit mereka. Etika *auditor* mendorong pengambilan keputusan yang transparan dan akurat, yang pada akhirnya menghasilkan kualitas *audit* yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Panduan Bagi *Auditor*: Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi *auditor* dalam menjaga *independensi*, meningkatkan integritas, dan memperkuat *profesionalisme*, serta menegakkan etika profesi dalam proses *audit*. Hal ini diharapkan dapat membantu *auditor* menghasilkan *audit* yang berkualitas tinggi.

b. Peningkatan Standar *Audit* di BPK RI: Penelitian ini memberikan masukan bagi BPK RI Perwakilan Wilayah Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas *audit*. Temuan ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan, program pelatihan, atau pedoman etika yang lebih efektif.

c. Rekomendasi Kebijakan Publik: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar empiris bagi pemerintah dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi dan *akuntabilitas* dalam pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas *audit* di sektor publik.

3. **Manfaat Akademis**:

   a. **Bahan Ajar**: Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mata kuliah terkait *auditing*, etika *profesi*, atau pengelolaan keuangan negara di perguruan tinggi, sehingga memberikan wawasan praktis dan teoritis kepada mahasiswa.

   b. **Referensi Penelitian Selanjutnya**: Penelitian ini menjadi dasar bagi studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang peran *independensi*, integritas, *profesionalisme*, dan etika *auditor* terhadap kualitas *audit*, baik di sektor publik maupun swasta.

4. **Manfaat Sosial**:

   a. **Meningkatkan Kepercayaan Publik**: Dengan meningkatnya kualitas *audit* yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil *audit* yang dilakukan oleh BPK RI, terutama di Sumatera Barat.

   b. **Mendorong Budaya Etika dan *Profesionalisme*:** Penelitian ini dapat memotivasi *auditor* untuk lebih menegakkan etika *profesi* dan menjaga standar *profesionalisme*, sehingga menciptakan budaya kerja yang berintegritas tinggi di lingkungan *audit*.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bagian. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian dijelaskan pada bab pertama. Latar belakang teori, tinjauan pustaka, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian, dan perumusan hipotesis telah dibahas pada bab kedua. Desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, *variabel* penelitian dan *variabel* pengukuran,

metodologi pengolahan dan analisis data, semuanya sudah dibahas dalam bab tiga. Temuan penelitian dan elemen-elemen lain yang mungkin berdampak pada kesimpulan dipaparkan pada bab keempat. Bab kelima berfungsi untuk menyajikan kesimpulan, keterbatasan dan saran.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA